

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan kerja sama antar negara tidak dapat dilepaskan dari adanya kerja sama ekonomi. Kebutuhan setiap negara yang berbeda-beda dan terus meningkat, menyebabkan ketergantungan antar negara yang juga semakin meningkat. Semakin meningkatnya ketergantungan antar negara, maka negara-negara tersebut harus memberi peluang terhadap perekonomian mereka dengan adanya kerja sama antar negara sehingga modal asing dapat masuk untuk memenuhi kebutuhan setiap negara. Semakin tinggi impor suatu negara mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam negeri di negara tersebut belum dapat terpenuhi ataupun negara tersebut tidak mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antar negara.

Adanya kerja sama antar negara saat ini semakin dipermudah dengan adanya proses globalisasi dan setiap negara tidak mungkin melewatkan proses tersebut. Dampak globalisasi dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Semua lapisan masyarakat terkena dampak globalisasi. Mulai dari bidang telekomunikasi, industri, sosial budaya sampai pendidikan pun ikut terdampak globalisasi.

Globalisasi membuat individu dan negara saling terkait dan tergantung satu sama lain antar manusia dan antar bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. (Indo Maritim, n.d.)

Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan didalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi. (Akhmad Nur Zaroni, 2015, p. 3)

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. (Akhmad Nur Zaroni, 2015, p. 3)

Penurunan biaya transportasi, serta meningkatnya kecepatan teknologi dan komunikasi telah membuat batasan-batasan geografis seperti tidak ada, hal ini diiringi oleh meningkatnya perdagangan global dan adanya bentuk-bentuk baru dari produk multinasional. Perekonomian global yang berkembang dengan pesat memberikan peluang bagi negara berkembang untuk berintegrasi ke dalam pasar global serta untuku meningkatkan perekonomian negara tersebut. (Salmon & Imber, 2008, p. 136)

Perkembangan ekonomi antar negara semakin terintegrasi dengan meningkatnya arus perdagangan baik di tingkat multilateral, regional, maupun bilateral. Tentunya dampak Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus ditaati ketika terlibat dalam kerja sama internasional. Indonesia harus tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh WTO baik itu dalam kerjasama regional maupun bilateral.

Perkembangan globalisasi menghasilkan ketimpangan antar negara, dimana terdapat negara yang kaya dan negara

miskin. Terjadinya ketimpangan pendapatan per-kapita antara negara maju dan negara berkembang. Dengan adanya kerja sama bilateral antar negara diharapkan hal tersebut dapat mengurangi perbedaan tersebut. (Talenta, n.d.)

Bantuan terhadap negara berkembang atau negara miskin tidak hanya berbentuk ODA (*Official Development Assistance*) dapat pula berbentuk kerja sama perdagangan dan investasi. Hal ini didapatkan baik dalam kerangka WTO maupun FTA (*Free Trade Agreement*) atau EPA (*Economic Partnership Agreement*). (Bank Indonesia, 2007, p. 236)

Jepang merupakan satu dari negara-negara maju di benua Asia, sangat diperhitungkan untuk menjalin kerja sama dan hubungan baik dalam bidang apapun. Hal ini mendorong Indonesia memperhitungkan Jepang untuk menjalin mitra penting dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Kesepakatan untuk melakukan kerja sama ekonomi bilateral yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan negara Jepang, kerja sama tersebut disingkat IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). (Avivi & Siagian, 2020, p. 50)

Bagi Indonesia, kerjasama IJEPA ini merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang pertama. Indonesia sudah mengadakan kerjasama ekonomi regional dengan Cina dan Korea Selatan sebagai bagian dari ASEAN dimana perjanjian tersebut hanya merupakan pembukaan akses pasar atau merupakan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTAs). Sebaliknya Jepang menawarkan kerjasama yang lebih luas dari FTAs, yaitu FTAs++ (FTAs plus-plus). (Achdiat Atmawinata, 2008, p. 10)

Economic Partnership Agreement menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (2010:18) “Satu bentuk kerjasama ekonomi yang tidak hanya mencakup perdagangan barang. Pariwisata, jasa dan investasi tapi juga mencakup *capacity building, joint*

ventures, perjanjian investasi, tenaga kerja. EPA merupakan bentuk kerjasama yang lebih komprehensif dibandingkan dengan *Free Trade Agreement* (C.S & Sulasmiyati, 2017, p. 192). Perjanjian perdagangan bebas bilateral (*Bilateral Trade Agreement*) merupakan bentuk pengembangan regionalism atau konsep kawasan. Regionalism dapat dibentuk dari Kerjasama antar dua negara, satu kelompok kawasan ke satu negara, atau antar kawasan. (Bank Indonesia, 2007, p. 210)

Kerja sama yang terbentuk antara Indonesia dengan Jepang ini merupakan bentuk dari ada liberalisasi perdagangan yang memiliki manfaat seperti akses pasar akan lebih terbuka secara luas sehingga memungkinkan adanya efisiensi, arus perdagangan dan investasi yang semakin mudah sehingga dapat meningkatkan efisiensi investasi, kesejahteraan konsumen akan meningkat seiring dengan berjalannya perdagangan bebas. (Achdiat Atmawinata, 2008, p. 1)

Perdagangan internasional merupakan suatu pilihan bagi negara yang terlibat. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan. Sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Dengan melakukan perdagangan maka suatu negara akan memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya memproduksi suatu komoditas, karena adanya spesialisasi yang dilakukan negara. (Priharto, n.d.)

Kerja sama antara Indonesia dengan Jepang sudah terjalin sejak lama. Jepang selama ini merupakan tujuan dari ekspor Indonesia sekaligus menempati urutan kedua negara asal impor Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang adalah negara pendonor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Hal itu dapat dilihat dari realisasi bantuan ODA Jepang di Indonesia.

Produk ekspor unggulan Jepang adalah barang industri. sementara produk ekspor unggulan Indonesia adalah barang primer. (Priharto, n.d.)

Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan Internasional dapat membuka peluang bagi suatu negara dengan memproduksi produk yang menjadi keunggulannya dan dapat mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga tentunya akan terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara. Sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan. Serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya serta meningkatkan harga jual.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan masalah yang sudah dipaparkan dalam satu pertanyaan, yakni:

“Mengapa Indonesia menyetujui kerja sama dengan Jepang melalui *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat menganalisa dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang pada industri Jepang di Indonesia melalui IJEP, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang sesuai. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan berdasar pada dua teori, yaitu teori kepentingan nasional dan teori model aktor rasional.

1. Kepentingan Nasional

Dalam ruang lingkup studi Hubungan Internasional, kerja sama baik bilateral maupun multilateral, hal terpenting untuk dianalisis adalah kepentingan nasional. Banyak strategi yang bisa dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, salah satunya dengan mengadakan

kerja sama bilateral. Meski kajian mengenai kepentingan nasional merupakan tradisi klasik dalam ruang lingkup studi hubungan internasional, kajian ini tetap menarik dan terus berkembang sesuai dengan berbagai fenomena kerja sama dan konflik antar negara dalam pergaulan dunia.

Pencetus teori terkait kepentingan nasional yang pertama yaitu Hans Joachim Morgenthau, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai alat untuk mengejar kekuasaan, karena satu negara dapat mengambil kendali negara lain melalui kekuatan itu. Lebih tepatnya, konsep *national interest* adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan melestarikan fitur material, politik dan budaya yang bebas dari campur tangan lain. Felix E. Oppenheim mendefinisikan konsep kepentingan nasional sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan pemerintah nasional dalam ruang lingkup internasional. Hal ini menunjukkan kepentingan nasional suatu negara akan mempertahankan kedaulatan politik dan integrasi nasionalnya untuk menjaga kesejahteraan rakyat di mata internasional. Menurut Teuku May Rudy, *national interest* merupakan tujuan yang harus dicapai terkait dengan kebutuhan bangsa serta cita-cita nasional. Kepentingan nasional yang cenderung konsisten serta identik di berbagai negara maupun wilayah adalah kesejahteraan rakyat (termasuk kelangsungan hidup rakyat juga keperluan daerah) dan keamanan. Dua masalah utama ini harus ada, yaitu kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang merupakan dasar untuk menjelaskan atau menetapkan kepentingan nasional untuk masing-masing negara. Untuk Indonesia, kepentingan nasional secara umum telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat; "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Hans J. Morgenthau juga menjelaskan bahwa konsep

kepentingan nasional memiliki dua faktor. Yang pertama adalah adanya suatu hal yang dituntut secara nasional karena sangat dibutuhkan dan yang kedua yaitu sesuatu yang dapat diubah serta diputuskan oleh situasi. Kepentingan nasional yang terdapat pada setiap negara adalah berbeda dan dapat berubah sesuai dengan masanya. Ditegaskan pula oleh Martha Finnemore dan Jutta Weldes bahwa keadaan dan peran yang berbeda dalam sistem internasional membuat kondisi kepentingan nasional tiap negara pun berbeda-beda. Kepentingan nasional bersifat subjektif, tergantung dengan arah kebijakan yang dibuat negara tersebut, terlebih lagi mengenai kebijakan luar negeri suatu negara. Maka kepentingan nasional dapat pula disesuaikan oleh aktor-aktor yang berperan dalam pemerintahan. Jadi, kepentingan nasional bukan hanya tentang kepentingan banyak orang, namun bisa juga menjadi kepentingan beberapa orang yang ditujukan sebagai kepentingan bersama. Hal tersebut mengenai kepentingan nasional, negara mengambil peran aktif sebagai aktor dalam pengambilan keputusan serta mewakili masyarakatnya untuk melakukan interaksi dengan dunia global internasional.

Pada saat ini kepentingan nasional akan mengarahkan negara kepada suatu hubungan baik yang disebut kerja sama. Perubahan yang terjadi setelah perang berakhir merubah konflik menjadi kebutuhan akan kerja sama demi mewujudkan kepentingan nasional setiap negara. Negara berperan dalam menciptakan keadaan yang aman bagi rakyatnya, berusaha untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Munculnya kepentingan nasional ini menunjukkan berbagai perspektif telah menjadi sebuah identitas nasional. Tergantung pada identitas yang dibuat, contohnya seperti menetapkan tujuan untuk waktu dekat, tujuan sementara atau tujuan keberlanjutan atau jangka panjang. Apakah identitas itu sangat penting atau tidak, itu juga berhubungan dengan pentingnya identitas.

Dalam aspek kerja sama bilateral Indonesia – Jepang, teori mengenai kepentingan nasional digunakan dalam

analisa kerja sama Indonesia dan Jepang melalui kerja sama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Teori ini digunakan sebagai sudut pandang untuk melihat kepentingan nasional Negara Indonesia dalam sektor ekonomi. Kemudian akan dapat diketahui mengapa Indonesia perlu mencari aspek pencapaian kepentingan nasional hingga sampai luar batas negara. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kerja sama antara Indonesia-Jepang untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing negara yang berhubungan perluasan kerja sama ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (negara, Lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama (Putri, n.d.). Kerja sama muncul karena adanya permasalahan yang terdapat baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dan juga karena adanya perbedaan sumber daya alam, sebuah negara melakukan kerja sama dengan negara lain yang memiliki sumber daya alam yang tidak ada di negaranya tersebut dan di negara lain ada (Ava Alifia, n.d.). Dalam hal ini dibutuhkan peranan negara untuk menyelesaikan atau membahas masalah, lalu ada bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak. Kerjasama juga dapat muncul karena adanya komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan.

Semakin baik kerja sama antar negara-negara di dunia akan membuat perkembangan antar negara baik pula. Untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya maka setiap negara melakukan kerjasama ekonomi yang akan menguntungkan bagi negaran dan warga negaranya. Kerjasama dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara sedangkan kerjasama multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara.

Dan aktor utama dalam pelaksanaan kerja sama bilateral adalah negara.

Perekonomian dunia bergantung saling bergantung dengan adanya perdagangan bebas atau *free trade*. Perdagangan bebas memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan pendapatan negara lewat kegiatan ekspor, mengurangi biaya impor, serta untuk mendorong perdagangan yang akan berpengaruh terhadap perekonomian negara yang terlibat. (Ibnu Ismail, n.d.)

Salah satu bentuk dari perdagangan bebas adalah *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang merupakan suatu bentuk hubungan kerja sama ekonomi dan memiliki dasar *Free Trade Agreement* (FTA). Perjanjian kemitraan ekonomi ini memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara maupun kawasan lain dalam berbagai bidang. (Kementerian Perdagangan, 2014, p. 3)

Kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang yang berada dalam kerangka *partnership* atau kemitraan merupakan model baru dari hubungan bilateral antar negara. Dalam kerangka ini ditekankan pula dengan adanya tujuan yang sama suatu negara serta ada rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pada bidang tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu pelaksanaan kerjasama ini diputuskan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu fungsi penting dari pemerintah adalah untuk mengatur arah strategis negara di dalam kerja sama kemitraan.

Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerja sama internasional dipahami sebagai "karena saling ketergantungan masyarakat dalam lingkup internasional dan hubungan antarpribadi yang semakin kompleks, diperlukan kerja sama dalam komunitas internasional". Alasan untuk melakukan kerja sama internasional adalah adanya national understanding dan kesamaan tujuan, didukung dengan iklim internasional yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kerja sama pada dasarnya adalah kepentingan bersama antar negara, tetapi kepentingannya tidak sama. Kerja sama

internasional berdampak pada berbagai negara dan kepentingan nasional negara yang tidak dapat diwujudkan oleh negara. Kerja sama internasional merupakan sudut pandang yang lain dari konflik internasional dan perspektif hubungan internasional. Masalah utama kerja sama internasional didasarkan pada konsep sejauh mana kepentingan bersama yang dihasilkan melalui kerja sama yang dilakukan demi untuk mendukung kepentingan yang bersaing secara sepihak. Kerja sama Internasional terbentuk dalam kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan nasional, dan keamanan.

Kerja sama internasional adalah kerja sama antar negara untuk menciptakan sebuah hubungan antar negara. Bentuk kerja sama dan interaksi dapat dibedakan jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan antara kedua negara, seperti kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Dan dalam penelitian ini, penulis fokus membahas kerja sama bilateral dengan konsep kepentingan nasional dan model aktor rasional yaitu negara. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang terjalin hanya antara dua negara. Hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam hubungan bilateral adalah negara. Hal yang dapat dilakukan untuk kerja sama bilateral dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Salah satu bidang kerja sama yang akan dibahas penulis adalah dalam bidang ekonomi. Saat ini, banyak negara bekerja sama di bidang ekonomi. Selain memiliki manfaat antar negara yang terlibat, kerja sama ekonomi juga sangat efektif dalam implementasinya. Sifat kooperatif dari setiap negara yang bersifat universal untuk menciptakan situasi yang dapat menghindari berbagai masalah dan konflik internasional.

Pada era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, suatu negara tidak dapat beroperasi sendiri, tertutup, atau hanya mengandalkan potensi negaranya. Sebab sangat hebat

kekuatan dan potensi suatu negara, jika tidak bekerja sama dengan negara lain, ia masih belum bisa berkembang dan maju. Potensi yang dimiliki didistribusikan untuk negara lain, sedangkan potensi yang tidak dimiliki diimpor dari negara lain. Mengingat hal ini, negara-negara maju perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang, dan hal yang terpenting adalah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat memerlukan kerja sama yang mendalam dan komprehensif untuk mempromosikan semua bidang di kedua negara, termasuk bidang sosial ekonomi. Dalam studi ini, tujuan kerja sama ekonomi bilateral adalah untuk meningkatkan ekonomi kedua negara. Diutamakan bahasan mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama ekonomi bilateral dengan Jepang dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia-Jepang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Investasi sebagai salah satu konsep penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Investasi dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi berbagai negara, investasi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber modal bagi negara penerima. Investasi merupakan komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut sebagai investor. (Cahya Dicky Pratama, n.d.)

Terdapat dua macam investasi, yang pertama adalah *Foreign Direct Investment* atau investasi langsung yaitu keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan penanaman modal. Investasi langsung dapat dilakukan salah satunya dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi, dan lain-lain. Sementara *Portfolio Investment* atau Investasi tidak

langsung, pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. (Repository UPH, 2018)

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh Jepang adalah *Foreign Direct Investment*, dimana Jepang tidak hanya memberikan modal saja bagi Indonesia masuknya investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) memberikan dampak positif bagi negara-negara penerima investasi. Selain mendapatkan bantuan investasi berupa modal, hal ini juga dimanfaatkan sebagai saran untuk mentransfer teknologi produksi, keterampilan, dan kemampuan melakukan inovasi. Dengan adanya investasi asing yang masuk ke suatu negara, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan lain berupa terbukanya akses pasar yang lebih luas lagi dengan negara lain. (Mallampally & Sauvant, 1999)

2 Model Aktor Rasional

Negara mengambil tindakan dikarenakan aktor-aktor dalam pemerintahan (*decision maker*) memilih tindakan tersebut. Salah satu cara dalam memahami proses pengambilan kebijakan dapat dilihat dalam model kebijakan rasional. Dimana perlakuan suatu negara dijelaskan dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna dalam melihat dan menempatkan diri pada situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dijelaskan dengan asumsi bahwa negara tersebut mempertimbangkan pilihan yang ada dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Pemerintah dalam hal ini merupakan aktor utama dengan tugas meneliti berbagai tujuan-tujuan, mengevaluasi berdasarkan keuntungan dan kemudian menentukan pilihan dengan keuntungan yang paling tinggi. Oleh karena itu kemudian

kebijakan dalam paradigma ini dapat dikatakan sebagai pilihan nasional atau national choice.

Kebijakan yang dikeluarkan untuk pilihan rasional yang memiliki beberapa komponen didalamnya, diantaranya adalah tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan. Tujuan dan sasaran utama dari *rational choice* disini adalah keamanan dan juga kepentingan nasional. Oleh sebab itu, jalan pintas yang diajukan dalam pengambilan kebijakan adalah beragam dan juga dengan mempertimbangkan konsekuensi positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan. Suatu pilihan atau kebijakan rasional merupakan pemaksimalan suatu nilai. Jadi, aktor rasional, dalam hal ini *decision maker*, memilih alternatif dengan hasil tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya. Model Aktor Rasional merupakan bagian atau instrumen dari *Rational Choice* pilihan rasional, yang menempatkan negara sebagai sebuah aktor utama dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dijabarkan oleh Allison bahwa: "Politik luar negeri dalam model Aktor rasional, dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional." Menurut Graham T. Allison dalam model aktor rasional pembuatan keputusannya digambarkan sebagai suatu proses intelektual, dimana pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, dalam politik luar negerinya harus mengutamakan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif arah kebijaksanaan yang bisa diambil pemerintah, dengan perhitungan untung rugi atas alternatif tersebut. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Model Aktor rasional ini merupakan model pertama yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, dalam kajian politik luar negeri. Penjelasan lain diberikan oleh Allison adalah dimana perilaku negara digambarkan seperti aktor individual rasional dan sempurna yang umumnya diasumsikan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap setiap situasi, dan akan mencoba untuk

memaksimalkan apa saja nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Pemerintah dianggap sebagai aktor utama, pemerintah meneliti seperangkat tujuan-tujuan, mengevaluasinya berdasarkan keuntungan, baru kemudian memilih salah satu yang memberikan keuntungan atau pay off paling tinggi.

Dalam hal ini, Indonesia dan Jepang adalah aktor rasional, yaitu negara. Yang dimana masing-masing negara tersebut ingin mencapai kepentingan dan tujuan bangsanya. Untuk mencapai hal tersebut, maka antar negara membuat suatu kebijakan yang digunakan sebagai pemenuhan tujuan dan sasaran, juga tidak lupa memperhatikan kepentingan nasional dan keamanan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang paling tinggi dalam keputusan kebijakan yang baik sehingga dapat berguna bagi negara. Kebijakan yang disetujui oleh Indonesia dan Jepang adalah kebijakan pada sektor ekonomi yaitu *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

Melalui kerangka pemikiran ini maka diharapkan dapat membantu dalam proses menjawab rumusan masalah. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepentingan nasional dan model aktor rasional yaitu negara, yang mencakup kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas, yang lebih digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA. Dan terdapat juga mengenai konsep investasi itu sendiri untuk menjelaskan investasi yang dilakukan Jepang di Indonesia. Penulis pun akan menambahkan unsur Kepentingan nasional masing-masing negara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA selain sektor industri pada bab pembahasan.

D. HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil hipotesis yaitu dengan kebijakan perdana pada sektor ekonomi yang dilakukan antar negara, Indonesia dan

Jepang, yaitu IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) diharapkan dapat memperkuat arus atau akses pasar ke negara tujuan, meningkatkan kapasitas perdagangan antar negara, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan basis kualitatif, penulis akan mengandalkan teks dan dokumen sebagai sumber data. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mengenai kerja sama Indonesia dan Jepang pada industri Jepang di Indonesia melalui *Indonesia-japan Economic Partnership Agreement*. Kemudian menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dengan teori kepentingan nasional dan model aktor rasional dalam kerja sama ekonomi bilateral.

F. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan mengenai kerjasama Indonesia dan Jepang pada industri Jepang di Indonesia melalui *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement*.

G. BATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan berbagai sektor kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Setelah itu lebih dalam akan membahas kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang melalui IJEPA dengan fokus sektor industri dan juga investasi. Kemudian, membahas arus pasar dan perdagangan antar negara.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab sebagai sistematika pembahasan.

Bab-bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan. Pada bab I akan dijelaskan mengenai pendahuluan sebagai dasar dari penulisan. Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan mengenai topik penelitian.

Bab II Hubungan Bilateral Indonesia dan Jepang. Bab ini akan membahas sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Jepang sebelum 1945, sesudah kemerdekaan, orde baru sampai orde lama, dan era reformasi. Kemudian penulis akan memaparkan bentuk-bentuk kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang.

Bab III Kerjasama Ekonomi Indonesia – Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Bab ini akan membahas kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang dan akan terbagi kedalam dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan IJEPA, dan pada bagian kedua menjelaskan mengenai Investasi Jepang sebagai penggerak ekonomi Indonesia.

Bab IV Kerjasama Indonesia dan Jepang pada Industri Jepang di Indonesia melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Pada bab ini akan memaparkan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Industri Jepang. Kemudian akan dijelaskan dampak investasi Jepang terhadap industri Indonesia. Dan yang terakhir mengenai pengaruh Jepang pada industri manufaktur Indonesia.

Bab V Kesimpulan. Sebagai bagian akhir dari penelitian maka pada bab ini akan berisi mengenai penegasan jawaban dari pertanyaan penelitian yang terkait dengan kerja sama Indonesia dan Jepang pada industri Jepang di Indonesia melalui IJEPA.